



RLPPD

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

TAHUN 2024



Kabupaten Penajam Paser Utara

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang maha Esa, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sistematika dan isi laporan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut dan berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024. Laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 pada dasarnya merupakan gambaran umum dari hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan Indikator Kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang tertuang di dalam rincian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang telah ditetapkan.

Semoga Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi tentang pelaksanaan Pemerintahan khususnya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara, serta dapat bermanfaat bagi semua pihak.



Penajam, Maret 2025

TTD

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

A. Pendahuluan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Penajam Paser Utara ini disusun dalam bentuk ringkasan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Bab IV Pasal 22 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bab V pada Pasal 24 sampai dengan Pasal 28.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun dalam bentuk ringkasan disebut dengan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) dan merupakan informasi utama terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan yang dipublikasikan oleh Pemerintah Daerah kepada publik dengan muatan informasi sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional, data dan informasi yang disajikan ini adalah hasil kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun capaian kinerja makro dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	(%) Capaian Kinerja Tahun 2023	(%) Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Indeks pembangunan manusia	74.33	74.94
2	Angka kemiskinan	6.97	6.69
3	Angka pengangguran	2.07	2.05
4	Pertumbuhan ekonomi	29.4	30.68
5	Pendapatan per kapita	12.517	13.1
6	Ketimpangan pendapatan	0.299	0.258

Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024

a. Indeks Pembangunan Manusia

Sebagai gambaran tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah, direpresentasikan melalui sejumlah indikator penyusun yang menghasilkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan capaian pada tahun 2024 IPM Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai

74,94 atau mengalami kenaikan sebesar 0,82 % dibanding tahun 2023 yang mencapai 74,33.

b. Angka Kemiskinan

Penduduk dikategorikan menjadi penduduk miskin jika pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kemiskinan akan semakin meluas jika perbedaan pendapatan antara kelompok penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan non makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Pada tahun 2024 angka kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 6,69% atau mengalami penurunan sebesar 0,28% dibanding tahun 2023 angka kemiskinan mencapai 6,97%, dan ini menjadi harapan Pemerintah Daerah untuk terus menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

c. Angka Pengangguran

Salah satu masalah ketenagakerjaan adalah pengangguran. Pengangguran adalah penduduk yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha, tidak punya pekerjaan tetapi tidak mencari pekerjaan dengan alasan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan atau sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja dan ini menjadi tantangan yang berat bagi Pemerintah Daerah untuk mengurangi angka pengangguran adapun angka pengangguran di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2024 sebesar 2,05 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 2,07 artinya data ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,02%.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami pertumbuhan sebesar 30,68% pada tahun 2024 berbeda arah pertumbuhan dibanding tahun 2023 pertumbuhannya sebesar 29,4%. Kondisi ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 4,4%.

e. Pendapatan Per Kapita

Dalam hal ini BPS tidak menghitung secara langsung data pendapatan, oleh sebab memiliki kecenderungan bayes yang tinggi. Dalam hal ini BPS menggunakan proksi/pendekatan pengeluaran untuk mendekati pendapatan penduduk, Satuan=(Ribu Rupiah/Kapita/Tahun) Pengeluaran per kapita adalah

biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Kegunaan= Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan Pada Tahun 2024 dengan nilai sebesar 13.100 naik dibanding tahun 2023 sebesar 12.517.

f. Ketimpangan Pendapatan

Sama halnya dengan ketimpangan pendapatan BPS tidak menghitung secara langsung data pendapatan oleh sebab memiliki kecenderungan bayes yang tinggi. Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Gini ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan. Nilai gini ratio berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai gini ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Pada tahun 2024 angka Gini Rasio Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 0,258 menurun dibanding tahun 2023 sebesar 0,299.

2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Tabel 1.2 Capaian Urusan Pendidikan

No IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 5.344 x100 % Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan = 7.403	72%
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam 2endidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 22.095 ----- x 100 % Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan = 22.953	96%

1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam 2 pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 9.009 ----- x 100 % Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan = 11.452	78%
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan 2 pendidikan dasar dan menengah yang; berpartisipasi dalam 3 pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 180 Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 833	21%

b. Urusan Kesehatan

Tabel 1.3 Capaian Urusan Kesehatan

No IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN
1.b.1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 150 -----x 1000 Jumlah Penduduk di Kabupaten = 202.067	0,764
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 2 ----- x 100 % Jumlah RS di kabupaten = 2	100%
1.b.3	Persentase ibu hamil Mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang medapatkan pelayanan kesehatan = 3.079 ----- x 100 % Jumlah ibu hamil di kabupaten = 6.572	47%
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 2.642 ----- x 100 % Jumlah ibu bersalin di kabupaten = 6.526	40%

1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 2.451 ----- x 100 % Jumlah bayi baru lahir di kabupaten = 6.333	39%
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 10.867 -----x 100 % Jumlah balita di kabupaten = 18.601	58%
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 30.104 ----- x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten = 30.525	98%
1.b.8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 56.108 ----- x 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten = 189.726	29%
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 18.271 ----- x 100 % Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten = 20.045	91%
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 15.277 ----- x 100 % Jumlah penderita hipertensi di kabupaten = 17.809	85%
1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 4.335 ----- x 100 % Jumlah penderita DM di kabupaten = 4.908	88%

1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 253 ----- x 100 % Jumlah penderita ODGJ di kabupaten = 294	86%
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 5.497 ----- x 100 % Jumlah penderita TBC di kabupaten = 6.437	85%
1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 5.872 ----- x 100 % Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten = 7.685	76%

c. Urursan Pekerjaan Umum

Tabel 1.4 Capaian Urusan Pekerjaan Umum

No IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) = 0 ----- x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) = 0	Kab.PPU Tidak ada wewenang Wilayah Sungai berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai
1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m) = 0 ----- x 100 % Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten (m) = 0	Kab.PPU Tidak ada wewenang Wilayah Sungai berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai Kab.PPU Tidak ada

			wewenang Wilayah Sungai berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 431,85 x 100 % Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten = 3.081	14%
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten. = 62.630 ----- x 100 % Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut. = 64.513	97%
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 63.665 ----- x 100 % Jumlah rumah tangga di Kabupaten = 64.513	98%
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya = 22 ----- x 100 % Jumlah Persetujuan Bangunan	100%

		Gedung yang berlaku = 22	
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 364,93 Jumlah total panjang jalan kabupaten = 1031,3	35%
1.c.8.1	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 1.260v ----- x 100 % Jumlahkebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten = 2.365	53%
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 473 ----- x 100 % Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 475	99%

d. Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tabel 1.5 Capaian Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN
1.d.1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 0 ----- x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 0	Tidak terdapat kegiatan fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah dan kegiatan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana.

1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 0 ----- x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 0	Tidak terdapat kegiatan fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah dan kegiatan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana.
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 2,4 ----- x 100 % Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha (Target Setahun) = 2,4	100%
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni = 109. ----- x 100 % Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 50.718	0,2 %
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 2.012 ----- x 100 % Jumlah unit rumah kab/kota = 2.012	100%

e. Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Tabel 1.6 Capaian Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat

No IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani = 39 ----- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 39	100%
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 15 ----- x 100 % Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 15	100%

1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 296 x 100 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = 296	100%
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 208 Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 208	100%
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 90 ----- x 100 % Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 90	100%
1.e.6	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani = 69 ----- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 69	100%
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	11,14 Menit

f. **Urusan Sosial**

Tabel 1.7 Capaian Urusan Sosial

No IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN
1.f.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 452 ----- x 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 452	100 %
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi	100%

	yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota;	kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 948 . ----- x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 948	
--	---	--	--

3. **Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya**

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terhadap LPPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 sampai saat diterbitkannya dokumen ini belum ada hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri dalam Negeri, sehingga tidak dapat diketahui status Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan hasil dari penilaian Kementerian Dalam Negeri.

Adapun Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini menunjukkan predikat yang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan Daerah.

4. **Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah**

Berdasarkan Ketentuan Pasal 23 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapantan Daerah, kemudian ditegaskan di ayat 2 bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

Kemudian berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 Ayat 3 Peaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RKP dan program strategis nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, melalui Pemerintah Daerah.

Berdasarkan rujukan ketentuan perundangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan dokumen operasional Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mencapai target-target kinerja yang ditetapkan Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024.

Di dalam perjalanan pembangunan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 ini tidak bisa kita pungkiri bahwa perubahan-perubahan kebijakan baik pendapatan, Dana Alokasi Umum (DAU) dana alokasi khusus dan asumsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta beberapa program dan kegiatan yang digulirkan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara membawa konsekuensi adanya perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan pada Pasal 161 Ayat (2) perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat dilaksanakan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, seperti Bencana Alam dan Non Alam berupa mewabahnya Virus dan konflik sosial.

Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Untuk melihat pagu dan realisasi APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada table LRA di bawah ini.

Tabel 1 Realisasi APBD Kabupaten Penajam Paser UtaraTahun 2024

Uraian	Ref	Anggaran Setelah Perubahan 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
2		3	4	5	6
PENDAPATAN	5.1.1	2.954.879.411.645,00	2.862.765.415.805,59	96,88%	2.252.747.559.375,91
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	49.497.656.912,00	41.163.472.329,00	83,16%	27.163.606.283,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	74.033.188.951,00	90.663.248.773,27	122,46%	13.971.122.644,00
Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	2.671.835.000,00	2.836.972.447,82	106,18%	2.771.713.802,07
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	19.008.617.145,00	42.525.392.320,07	223,72%	80.661.853.521,27
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		145.211.298.008,00	177.189.085.870,16	122,02%	124.568.296.250,34
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1				
Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1	1.820.760.814.852,00	1.735.838.599.000,00	95,34%	1.361.861.300.165,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1	319.227.914.000,00	309.102.018.496,00	96,83%	287.297.358.273,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.1	165.388.570.000,00	160.676.842.562,00	97,15%	56.150.254.530,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.1	106.572.404.000,00	101.959.628.668,74	95,67%	90.198.557.197,57
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		2.411.949.702.852,00	2.307.577.088.726,74	95,67%	1.795.507.470.165,57
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2				
Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.2	-	-	-	5.913.954.000,00
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-
Dana Desa	5.1.1.2.2	28.752.839.000,00	29.595.849.000,00	102,93%	29.452.924.000,00
Dana Insentif Fiskal	5.1.1.2.2	9.965.274.000,00	6.165.287.000,00	61,87%	-
Jumlah Pendapatan Transfer Pusat Lainnya		38.718.113.000,00	35.761.136.000,00	92,36%	35.366.878.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.3				
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3	236.653.559.785,00	202.543.011.551,00	85,59%	211.087.744.137,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3	74.790.000.000,00	74.790.000.000,00	100,00%	72.070.000.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		311.443.559.785,00	277.333.011.551,00	89,05%	283.157.744.137,00
Total Pendapatan Transfer		2.762.111.375.637,00	2.620.671.236.277,74	94,88%	2.114.032.092.302,57
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	255.000.000,00	526.748.711,00	206,57%	3.265.871.600,00
Pendapatan lainnya	5.1.1.3.2	47.301.738.000,00	64.378.344.946,69	136,10%	10.881.299.223,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		47.556.738.000,00	64.905.093.657,69	136,48%	14.147.170.823,00
Jumlah Pendapatan		2.954.879.411.645,00	2.862.765.415.805,59	96,88%	2.252.747.559.375,91
BELANJA	5.1.2				
BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	730.491.208.041,00	696.738.302.133,00	95,38%	562.618.503.072,60
Belanja Barang	5.1.2.1.2	971.061.783.247,00	901.535.393.804,44	92,84%	666.679.927.300,43
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	10.081.142.824,00	9.329.601.458,00	92,55%	13.340.442.349,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	69.418.033.379,00	65.979.318.933,00	95,05%	48.548.844.183,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	5.136.600.000,00	5.111.600.000,00	99,51%	478.500.000,00
Jumlah Belanja Operasi		1.786.188.767.491,00	1.678.694.216.328,44	93,98%	1.291.666.216.905,03
BELANJA MODAL	5.1.2.2				
Belanja Tanah	5.1.2.2.1	27.615.680.000,00	6.174.423.795,00	22,36%	5.544.298.893,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	301.401.874.273,00	289.780.597.537,00	96,14%	170.110.092.092,00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	298.257.267.004,00	278.730.711.048,11	93,45%	139.692.870.320,65
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	595.477.525.929,00	588.118.370.310,67	98,76%	290.726.374.346,84
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	9.439.023.153,00	9.343.376.680,00	98,99%	4.427.546.827,00
Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	3.882.543.441,00	3.617.989.675,00	93,19%	1.672.570.000,00
Jumlah Belanja Modal		1.236.073.913.800,00	1.175.765.469.045,78	95,12%	612.173.752.479,49
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3				
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	9.089.139.681,00	138.053.926,00	1,52%	15.411.994.072,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga		9.089.139.681,00	138.053.926,00	1,52%	15.411.994.072,00
BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.2.4.1	6.647.101.191,00	6.446.444.191,00	96,98%	-
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	5.1.2.4.2	161.583.807.500,00	161.618.636.000,00	100,02%	165.434.004.052,00
Jumlah Belanja Transfer		168.230.908.691,00	168.065.080.191,00	99,90%	165.434.004.052,00
Jumlah Belanja		3.199.582.729.663,00	3.022.662.819.491,22	94,47%	2.084.685.967.508,52
Surplus/ (Defisit)		(244.703.318.018,00)	(159.897.403.685,63)	65,34%	168.061.591.867,39
PEMBIAYAAN	5.1.3				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	300.333.993.658,00	300.563.236.270,62	100,08%	187.632.320.043,23
Penggunaan SiLPA	5.1.3.1.1	300.333.993.658,00	300.563.236.270,62	100,08%	187.632.320.043,23
Jumlah Penerimaan		300.333.993.658,00	300.563.236.270,62	100,08%	187.632.320.043,23
PENGELUARAN DAERAH	5.1.3.2	55.630.675.640,00	55.130.675.640,00	99,10%	55.130.675.640,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.3.2.1	- 55.630.675.640,00	- 55.130.675.640,00	- 99,10%	- 55.130.675.640,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.1.3.2.2				
Jumlah Pengeluaran		55.630.675.640,00	55.130.675.640,00	99,10%	55.130.675.640,00
Pembiayaan Neto	5.1.4	244.703.318.018,00	245.432.560.630,62	100,30%	132.501.644.403,23
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	5.1.4.1	-	85.535.156.944,99	-	300.563.236.270,62

5. **Inovasi Daerah**

Inovasi Daerah merupakan bagian dari kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang diharapkan dapat menginisiasi lahirnya ide dan gagasan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan tata kelola pemerintah daerah. Dalam rangka penggalian ide-ide inovasi dari Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang akan dilaksanakan dan juga bekerja sama dengan lembaga/instansi yang ahli dalam inovasi untuk melakukan penilaian inovasi yang dilaksanakan Organisasi Perangkat daerah (OPD), Adapun inovasi yang dilakukan dari masing-masing Organisasi Perangkat daerah (OPD) dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut :

No.	NAMA INOVASI DAERAH	OPD
1	Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat (SIMPELMAS)	Sekretariat Daerah
2	Sistem Informasi Kehadiran Pegawai (HADIRKU)	Sekretariat Daerah
3	Live Streaming Rapat-Rapat Paripurna	Sekretariat DPRD
4	Sistem Pengajuan dan Pencairan Dana Desa (SIPANCARDES)	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	Research And Development Center (RDC-PPU)	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
6	Sistem Pelayanan Pendaftaran Pembuatan Kartu Pencari Kerja (SI PENTA KAPEKA)	Dinas Tenaga Kerja
7	Sistem Aplikasi Gerai Ketenagakerjaan (SIAP GERAK)	Dinas Tenaga Kerja
8	Memasyarakatkan Lenggeng Ronggeng Benuo Taka Berbasis Multi Media	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9	CAKEP PPU (Cara asik kenali pariwisata Penajam Paser Utara)	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
10	SOSIS KEKINIAN	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
11	LAYANAN ONLINE ADMINDUK APLIKASI GO PPU	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	LAYANAN ONLINE ADMINDUK APLIKASI GO PPU	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Layanan Online Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berbasis Website (SERAMBI NUSANTARA)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	Intervensi Pangan Kendalikan Masalah Balita Gizi Buruk (SI PANGLIMA BIRU)	Dinas Ketahanan Pangan
15	Sertifikasi dan Registrasi Tingkatkan Mutu Pangan Makin Istimewa (SRI KATUNGAN MANIS)	Dinas Ketahanan Pangan
16	Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat (SIMPELMAS)	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Pembuatan website one stop service secara online dinas kukmperindag	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
18	LAYANAN SETIA (Sedot Tinja Anda)	Dinas Lingkungan Hidup
19	SERBU GASS (Seratus Bank Sampah Unit Dan Gerakan Sedekah Sampah)	Dinas Lingkungan Hidup
20	Sistem Informasi Pelayanan Lingkungan Hidup Terpadu (SIPLAH TERPADU)	Dinas Lingkungan Hidup
21	Pembentukan Kampung KB Mandiri	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
22	Rusa Benuo Taka (Rembuk Wisata Daerah Kita)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23	Percepatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Desa Gender dan Anak (CETAR PUAN DESGENAK)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
24	Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Desa (Kilan Puan Lekdes)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	NAMA INOVASI DAERAH	OPD
25	Sadar Kekerasan Anak dan Perempuan (SAKERAPUAN)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
26	Integrasikan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dengan Lembaga Kemasyarakatan (IKAN MAS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
27	Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (Dr.PAPA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
28	Klinik Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (KLINIK PPRG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
29	KAPE ALI (Kantor Pelayanan Antar Izin)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
30	Tertib perizinan dan pelaporan investasi (BER-INVEST)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
31	Sistem Non Perizinan Berusaha Serambi Nusantara (SIPELAN)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
32	Akselerasi Perizinan Jemput Dan Antar (S-PUTAR)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
33	Sistem Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Mandiri Untuk Desa (Si Pendekar Maud)	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
34	KUUPAH PADI (Kunjungan Guru Pahlawan Pendidikan)	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
35	Solusi Pemetaraan Akses Pendidikan Dan Keterbukaan Publik (PPDB ONLINE)	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
36	Bersama Mencetak Juara	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
37	Wisata Edukasi Keliling	Dinas Perpustakaan dan Arsip
38	Youtube Edukasi Story (YUCAS)	Dinas Perpustakaan dan Arsip
39	Menulis Bersama Perpustakaan (MIS BAPER)	Dinas Perpustakaan dan Arsip
40	Multimedia Untuk Kesejahteraan (MUTU KERAN)	Dinas Perpustakaan dan Arsip
41	Multimedia Untuk Kesejahteraan (MUTU KERAN) Ai Chapter	Dinas Perpustakaan dan Arsip
42	Menulis Bersama Perpustakaan (MIS BAPER) Ai chapter	Dinas Perpustakaan dan Arsip
43	Wisata Edukasi Ceria Anak (WECERIA)	Dinas Perpustakaan dan Arsip
44	Go Siwab Tingkatkan Populasi Ternak Sapi	Dinas Pertanian
45	Optimalisasi Investasi Swasta Sektor Peternakan	Dinas Pertanian
46	Mini Ranch Optimalkan Keterbatasan Lahan Peternakan	Dinas Pertanian
47	SIPELUNAK (Integrasi Pelaku Usaha Peternakan)	Dinas Pertanian
48	PERI SABUN ANDALAN (Perawatan Induk Bunting Dan Anak Dua Bulan) Induk Sapi Bunting dan Anak Dua Bulan)	Dinas Pertanian
49	Biogas Enter Kopi (Biogas Energi Terbarukan Kotoran Sapi)	Dinas Pertanian
50	MIRA KANSIL (Mini Ranch Tingkatkan Hasil)	Dinas Pertanian
51	Transformasi Kelompok Tani Menuju Korporasi (TRANS KETAN JUSI)	Dinas Pertanian
52	Rumput Kolomendo Andalan Peternak Korporasi SAPI (RUKO ANAK KOPI)	Dinas Pertanian
53	Pupuk Organik Sapi Sahabat Tanaman (POS BATMAN)	Dinas Pertanian
54	Atasi Gangguan Reproduksi Memperbaiki Fungsi Reproduksi Sapi (SI GANGREP MISSISIPI)	Dinas Pertanian
55	Jembrana Ditangani Selamatkan Sapi Bali (JANGAN	Dinas Pertanian

No.	NAMA INOVASI DAERAH	OPD
	SESALI)	
56	Revitalisasi Usaha Dengan Integrasi Dan Konsolidasi Pelaku Usaha Peternakan Di Kabupaten Penajam Paser Utara (RUSA IKON PPU)	Dinas Pertanian
57	Sistem Penentuan Kuota Pupuk Bersubsidi Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara (SI PENTA KITANI)	Dinas Pertanian
58	Hygiene Personal Pelaku Usaha Peternakan Dengan Herbal Sanitizer (HYPER KUNAK BALTIZER)	Dinas Pertanian
59	Sistim Input Data Akurat dan Sederhana 1.0 (SIPUT DATA 1.0)	Dinas Pertanian
60	Penyajian Data Pertanian Berbasis Teknologi dan Perangkat webGIS (BETA MANGGIS)	Dinas Pertanian
61	Elektronik Pertanian Dini (EL TANI)	Dinas Pertanian
62	Cintaku di rumah singgah	Dinas Sosial
63	Stiker Harga diri	Dinas Sosial
64	DINSOS CERDAS (cerita di rumah singgah)	Dinas Sosial
65	Cepat Menangani Masalah Sosial Penajam Paser Utaran (PATAS PPU)	Dinas Sosial
66	Cinta Kita Di Rumah Singgah Kecamatan (CINTA RASKA)	Dinas Sosial
67	Sistem Peringatan Dini (EARLY WARNING SISTEM)	Dinas Sosial
68	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Inovasi Ekonomi Kreatif Dalam Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Sosial
69	KOST-@N APIP – Konsultasi Seputar Pengawasan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah	Inspektorat Daerah
70	KosT-@N APIP Mobile	Inspektorat Daerah
71	Antar Jemput Ijin (AJI)	Kecamatan Babulu
72	Sahabat Bumdes	Kecamatan Babulu
73	Kecamatan Membangun Embung Petani Sejahtera (Kembang Paser)	Kecamatan Babulu
74	Aplikasi Babulu Tangguh	Kecamatan Babulu
75	Melayani dan Menolong dengan Hati (MELODI)	RSUD Ratu Aji Putri Botung
76	Aplikasi Pendaftaran online Pasien Rawat Jalan RSUD Ratu Aji Putri Botung (PENCET RAPB)	RSUD Ratu Aji Putri Botung
77	Kelas Edukasi Pada Remaja Putri Tentang Persiapan Menarche Dan Kesehatan Reproduksi (KEJAR SI MANIS)	UPT. Puskesmas Penajam
78	Kenali Keluhan Kehamilan Agar Ibu Sehat Dan Sejahtera Pada Ibu Hamil (KEMILAU SENJA)	UPT. Puskesmas Penajam
79	Buatn Daftar Nama Calon Permata Hati Sebelum Lahir (BUNDA CORLA)	UPT. Puskesmas Penajam
80	RUANG CERIA	UPT. Puskesmas Penajam
81	Ayo Masyarakat Berhentilah Merokok di Depan Anak Agar Tidak Jadi Contoh Buruk (AYAM BERKOKOK DIATAS PAGAR)	UPT. Puskesmas Penajam
82	Cegah Anemia, Stunting dan KEK Agar Anak berkualitas (CANTIKNYA AKU)	UPT. Puskesmas Penajam
83	Membuat Sistem SPJ JKN Online Di Puskesmas Gunung Intan Dengan Menggunakan Google Sheet	UPT. Puskesmas Gunung Intan
84	Kartu Tanda Bahaya Kehamilan Dan Persalinan (TABAKALIN)	UPT. Puskesmas Petung
85	Upaya Peningkatan Penemuan Suspek TBC TCM Positif Melalui Inovasi Pelacakan Dan Investigasi Kontak TBC (SI PALING BATUK)	UPT. Puskesmas Petung
86	Kartu Tanda Bahaya Kehamilan Dan Persalinan (TABAKALIN)	UPT. Puskesmas Petung
87	Sistem Pelacakan Pasien TB UPT. Puskesmas Waru (SIPETE)	UPT. Puskesmas Waru

No.	NAMA INOVASI DAERAH	OPD
88	Sistem Penjaringan dan Eliminasi Stunting (SI PETUNG)	UPT. Puskesmas Waru
89	Pelayanan Terintegrasi Untuk Orang Dengan Risiko Penularan Hiv Dan Penyakit Menular Seksual (POLI SAYANG)	UPT. Puskesmas Sebakung Jaya
90	Gerakan Masyarakat Cegah Stunting (GERMAS CEKING)	UPT. Puskesmas Sebakung Jaya
91	Strategi Penanggulangan Tuberkulosis (SAPAGSIS)	UPT. Puskesmas Sebakung Jaya
92	Deteksi Penderita Hipertensi Dan Diabetes Militus Dengan Sasaran Pedagang Dan Pengunjung Pasar Senin (SERGAP PASAR SENIN)	UPT. Puskesmas Babulu Darat
93	Sertifikat Imunisasi Dasar LENGKAP (SERUNI MASAK KAKAP)	UPT. Puskesmas Babulu Darat
94	Pelayanan Telefarmasi Pemberian Informasi Obat	UPT. Puskesmas Maridan
95	Pengelolaan Obat Digitalisasi UPT. Puskesmas Semoi II Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 (FARMOI)	UPT. Puskesmas Semoi II
96	Gerakan Masyarakat Mengetahui Dan Menggunakan Obat Tradisional (GEMOT)	UPT. Puskesmas Semoi II
97	Pemeriksaan Hb Pada Remaja Putri Kelompok Usia 12 18 Tahun (PHP RETIKULOSIT)	UPT. Puskesmas Sepaku I
98	Layanan Peduli Imunisasi Meningkatkan Cakupan Imunisasi Sekolah (LAPIS MANIS)	UPT. Puskesmas Sepaku I
99	Sehat Dan Konsultasi Asyik Via Whatsapp (SEPAKAT)	UPT. Puskesmas Sepaku I
100	Remaja Lincah Tanpa Anemia (RELITA)	UPT. Puskesmas Sepaku I
101	Pos Malaria Hutan UPT. Puskesmas Sotek (POSMALHUT)	UPT. Puskesmas Sotek

B. Penutup

Laporan Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Informasi Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada Masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini juga berperan sebagai kendali, penilai kualitas kerja serta alat untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan juga merupakan pertanggungjawaban Pemerintah kepada publik yang implementasinya diwujudkan dalam bentuk Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2024.

Demikian disusunnya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024 ini semoga masyarakat dapat memanfaatkan informasi secara umum atas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara, akhir kalimat kami ucapkan;

=== Terima Kasih ===